

Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas

Stepanus Angga¹, Antonius Alfredo Poa², Fabianus Rikardus³

^{1, 2, 3} Program Magister Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia

E-mail: angga13cm@gmail.com¹, alfredo.poa22@gmail.com²,
fabi.lazaris@yahoo.com³



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 01-03-2023

Direview: 03-03-2023

Publikasi: 30-09-2023

Abstrak

Fokus penulisan ini adalah menyoalkan fenomena komentar-komentar netizen Indonesia di media sosial sebagai suatu ruang kebebasan berpendapat. Media sosial sering kali menjadi ajang bagi banyak orang untuk mengekspresikan perasaan dan keadaan dirinya. Pada saat yang sama, media sosial menjadi wadah ruang publik untuk menyampaikan ide-ide bagi banyak orang. Di dalamnya orang bebas berpendapat dan berkomentar meskipun kurang memiliki validitas yang kuat. Komentar-komentar netizen pun rupanya dapat membawa orang pada komunikasi yang tidak rasional karena dilakukan tanpa pertimbangan. Maka dalam metodologi penulisan artikel ini, penulis melakukan suatu studi penelitian kualitatif dengan mencari data-data dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan tentang etika komunikasi netizen Indonesia. Tulisan ini akan difondasikan pada filsafat ruang publik Jurgen Habermas yang mengajukan beberapa klaim dalam berkomunikasi. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis dan menelaah data penelitian dengan pemikiran teori komunikasi Habermas. Analisis tersebut akan menghasilkan temuan-temuan penelitian, yakni komunikasi dan opini yang disampaikan dalam kolom komentar sering kali tanpa suatu pertimbangan rasional. Netizen cenderung terbawa perasaan untuk berpartisipasi dalam komentar tanpa memahami realitas dengan baik. Media sosial hanya dipandang sebagai ruang publik biasa tanpa ada unsur rasionalitas yang saling menghargai hak masing-masing dan mendorong terbentuknya solidaritas sosial.

Kata Kunci: netizen; sosial media; ruang publik; demokrasi

Abstract

The focus of this article is to question the phenomenon of Indonesian netizens' comments on social media as a space for freedom of opinion. Social media often becomes a place for many people to express their feelings and circumstances. At the same time, social media has become a public space for conveying ideas to many people. In it, people are free to express opinions and comments even though they lack strong validity. It seems that netizen comments can lead people to irrational communication because they are done without consideration. So in the methodology for writing this article, the author conducted a qualitative research study by looking for data from journals and books related to the communication ethics of Indonesian netizens. This article will be based on Jurgen Habermas's philosophy of public space which makes several claims in communication. After the data was collected, the researcher analyzed and reviewed the research data using Habermas' communication theory. This analysis will produce research findings, namely that communication and opinions expressed in the comments column are often without rational consideration. Netizens tend to get carried away by participating in comments without understanding the reality properly. Social media is only seen as an ordinary public space without any element of rationality that respects each other's rights and encourages the formation of social solidarity.

Keywords: netizen; social media; public sphere; democracy

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi hari ini hampir tidak bisa dibendung lagi oleh apa pun karena hampir semua aktivitas manusia digerakkan dan dipengaruhi oleh media komunikasi dan teknologi. *Platform-platform* media sosial yang menarik ditawarkan kepada masyarakat dengan sangat mudah, seperti *Whatsapp*, *Tiktok*, *Instagram* dan sebagainya. Orang dapat dengan mudah dan bebas berkomunikasi dalam *platform* tersebut. Sebab di dalamnya terdapat ruang untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide yang bisa diakses oleh semua orang. Netizen (masyarakat yang aktif dalam kegiatan media *online*) diberi ruang yang tidak terbatas pada tempat dan waktu. Ada keleluasan untuk menyampaikan apa pun termasuk mengomentari postingan orang lain.

Ada pun komunikasi dalam media sosial tentu berbeda dengan komunikasi dalam pertemuan langsung atau verbal. Komunikasi dalam media sosial tentu validitasnya diragukan karena didasarkan pada sikap atau perasaan emosional yang tidak teruji. Fenomena tentang komentar yang sarkasme dalam media sosial pun sering terjadi, misal: kurang sopannya netizen Indonesia pada kolom komentar di *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan media sosial lainnya (Fauziah, 2021). Padahal sejatinya komunikasi merupakan suatu kenyataan diri yang “mengada” dan ini merupakan sebuah esensi manusia. Komunikasi diri manusia bukan sekedar disimak dalam kaitannya dengan manusia yang berkomunikasi satu dengan yang lain (Riyanto, 2018). Komunikasi itu hendaknya dibawa ke dalam ranah rasionalitas yang membangun.

Habermas, seorang filsuf komunikasi menawarkan suatu teori tindakan komunikasi untuk mencapai konsensus yang mumpuni sekaligus mengarahkan pada *bonum communae* (Habermas, 2006). Konsep tindakan komunikatif ini sebenarnya mau menampilkan sebuah pembicaraan di mana para peserta mensistematisasikan validitas yang bermasalah dan mencoba untuk mengkritisi realitas sosial dengan argumentasi-argumentasi yang memadai. Artinya, argumentasi tersebut mampu menghubungkan realitas sosial dengan pandangan-pandangan yang ada. Orang tidak sekedar mengeluarkan komentar-komentar tetapi sungguh-sungguh paham realitas dalam sebuah kesadaran yang penuh.

Indonesia, dalam konteks ini sebagai negara demokrasi, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat, memerlukan suatu deliberasi yang kuat untuk menghindari distraksi yang memecahkan rakyatnya. Deliberasi merupakan cara untuk mengerti kebutuhan masyarakat karena memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kuat. Deliberasi berasal dari kata latin *deliberatio* yang berarti “konsultasi, menimbang-nimbang, atau melakukan pertimbangan mendalam.” Hal ini hanya bisa dibangun dalam kesadaran yang rasional tentang etika berkomunikasi sehingga orang tidak mudah memunculkan sarkasme. Di dalamnya, orang tidak sesuka hati mengungkapkan emosinya dengan kata-kata yang berlebihan bahkan menjelekkan tanpa suatu penilaian kritis (Christina, 2019). Sebab media sosial menjadi ruang kebebasan bagi banyak orang untuk mengekspresikan dirinya. Namun, sebaliknya menjadi ruang bagi netizen untuk meluapkan komentar-komentar yang positif maupun negatif.

Efek dari kebebasan beropini di media sosial ini rupanya tidak luput dari *Verbal Bullying* yang merugikan beberapa orang. Menurut Nyoman dan Putu dalam tulisan mereka “*Verbal Bullying Dalam Media Sosial*” hal ini bisa berpengaruh terhadap psikologi korban *bullying*, mendapat ancaman, merendahkan harga diri, membuat rasa tidak nyaman, selalu mencurigai setiap orang yang berkomentar, dipenjara, intimidasi lingkungan sosial, dan paling parah membuat korban *bullying* ini menjadi pelaku *bullying* dan membiasakan *verbal bullying* sebagai sebuah kewajaran atau wadah lelucon (Suciartini & Sumartini, 2018). Menurut Diah dan Atiqah dalam “penelitian mengenai respon netizen terhadap *caption* Publik Figur di Instagram” memunculkan tiga *attitude* yaitu *affect*, *judgement*, dan *appreciation* (Purwaningsih & Sabardila, 2020). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ida dan kawan-kawan dalam tulisan mereka “Tuturan Kebencian Dalam Komentar Warganet..” mengenai komentar netizen mencakup sebagai berikut, yakni (1) bentuk penghinaan, (2) bentuk penyebaran berita bohong, (3) bentuk provokasi, (4) bentuk pencemaran nama baik, (5) bentuk penistaan, dan (6) bentuk penghasutan (Nuraeni et al., 2022).

Bentuk-bentuk komentar yang diberikan oleh netizen ini tentu disampaikan secara spontan tanpa memikirkan efek atau resikonya bagi pengguna akun yang dikomentari. Netizen merasa bebas berpendapat dan mengekspresikan isi hati dan pikirannya di kolom komentar siapa pun. Menurut Lutfi dalam “etika komunikasi perspektif islam”, komunikasi yang demikian seharusnya dipertimbangkan secara lebih matang dalam memposting status dan komentar di media sosial agar tidak menyinggung perasaan orang lain meskipun pengguna media sosial atau netizen

bebas mengeluarkan pendapatnya di kolom komentar yang tidak ada batasnya (Muawanah, 2021). Selain itu, rupanya komentar netizen yang sarkasme, menurut Nyoman dan Putu, *verbalbullying yang* mengemuka di media sosial yang bermaksud melucu atau menghadirkan kesan humor kepada khalayak dunia maya, tetapi hal ini sebenarnya menyindir (Suciartini & Sumartini, 2018). Secara umum menurut Joviano, Wella dan Ririn berdasarkan analisa yang mereka lakukan melalui model *Support Vector Machine (SVM)* dengan akurasi 81.2%, dengan kesimpulan bahwa dalam sebuah kolom komentar Instagram YouTuber Indonesia terdapat 49.524% komentar yang mengandung unsur *cyberbullying* (Siahaan et al., 2020).

Dalam konteks ini, penulis akan mengambil suatu kajian baru untuk memberi suatu interpretasi tentang kebebasan berkomentar di media sosial sebagai ruang publik. Dalam filsafat Habermas, Proses kesepakatan bersama ini dicapai dalam sebuah komunikasi yang rasional dan dilakukan dalam refleksi kritis terhadap realitas. Maka untuk mencapainya orang perlu metodologi. Habermas menawarkan atau memberi saran metodologi komunikasi melalui klaim-klaim validitas yang komprehensif. Klaim-klaim validitas tersebut adalah kejujuran, ketepatan, kebenaran, dan komprehensibilitas. Keempat klaim inilah yang akan mengantar orang untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritisi etika komunikasi netizen Indonesia sehingga media sosial sungguh-sungguh menjadi kesempatan dalam implementasi demokrasi yang baik dan benar demi kepentingan bersama.

2. Metode

Dalam penulisan ini, kami memanfaatkan metode penelitian kualitatif, data-data kami peroleh dari jurnal, buku dan artikel *online* yang berkaitan dengan komentar netizen sebagai ruang demokrasi kebebasan dan difondasikan pada filsafat ruang publik Jurgen Habermas. Data-data kami analisis secara kritis ke dalam kajian-kajian yang aktual sebagai suatu sumbangan dalam menelaah fenomena komentar netizen Indonesia. Kami akan masuk pada penelitian terdahulu yang mengkaji tentang komentar netizen Indonesia kemudian pada posisi duduk perkara yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni mengkritisi etika komunikasi netizen Indonesia di media sosial. Pembahasan tentang etika komunikasi netizen dalam telaah ruang publik Jurgen Habermas ini akan menghasilkan suatu temuan yang menjadi sumbangan dalam menanggapi realitas komunikasi dewasa ini. Sebab dari data *digital civility Index (CDI)* tahun 2020 menampilkan netizen Indonesia adalah pengguna internet yang kurang sopan di Asia Tenggara. Microsoft mengumumkan bahwa tingkat usia dewasa 68 persen tidak sopan dalam berkomunikasi, sedangkan usia remaja tidak memberi kontribusi dalam menurunnya tingkat kesopanan dalam media sosial (Center, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Ruang Publik Habermas

Istilah ruang publik sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi ruang publik kala itu didominasi oleh kaum elit borjuis yang dikolonisasi sistem politik (negara) dan ekonomi kapitalis (Menoh, 2015). Lalu, Jurgen Habermas, seorang filsuf yang memiliki pengaruh besar dalam dunia akademis pada masanya berusaha mengembalikan istilah ini ke hakekat aslinya sebagai ruang diskursus yang rasional. Dialog-dialog para profesional di atas podium, diskusi-diskusi panel dan perundingan-perundingan meja bundar memperlihatkan perdebatan yang rasional masyarakat privat menjadi satu dari sekian jumlah produksi bintang-bintang di radio, televisi atau saat ini media sosial yang kala itu didominasi oleh para pejabat atau kaum borjuis (Habermas, 2007). Namun, ruang ini hanya sepihak, Habermas menginginkan suatu "ruang antara" dimana warga negaranya memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka sendiri secara publik dan mempersoalkan segala tema relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman, 2009). Sebab, idealnya ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh semua orang, bebas, terbuka dan transparan serta tidak ada intervensi dari negara dan pasar di dalamnya (Bo'do et al., 2019).

Ruang publik dijelaskan atau digambarkan oleh Habermas sebagai ruang inklusif dan di dalamnya masyarakat secara kolektif mengekspresikan pendapat mereka berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Pembayun, 2017). Ruang publik tidak lagi menjadi ruang privat yang hanya menjadi milik kaum borjuis tetapi menjadi ruang bersama untuk kepentingan bersama. Semua orang memiliki hak untuk berpendapat, hak politik, begitu pula mereka yang dapat berubah profesi, atau mengubah status sosial mereka, artinya semua orang memiliki kesamaan derajat (Supriadi, 2017). Ruang publik menjadi ruang komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong terbentuknya

solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan yang majemuk (Menoh, 2015). Tetapi di sisi lain, Habermas mau menjelaskan bahwa Ruang Publik tidak hanya mengacu pada “fungsi” atau “isi” dari komunikasi sehari-hari tetapi merujuk pada ruang sosial yang dihasilkan dalam tindakan komunikatif (Regilme, 2018).

Dalam Teori Tindakan Komunikasi, Habermas memulai argumennya dengan mengartikulasikan bahwa setiap tindakan berbicara atau berkomunikasi apa pun akan menimbulkan yang disebut “klaim validitas universal” (Howe, 2000). Di sini Habermas menyebutkan empat macam klaim dalam sebuah komunikasi rasional (Hardiman, 2009): pertama klaim kebenaran (*truth*), klaim ini terjadi bila orang bisa sepakat tentang dunia alamiah dan obyektif. Kedua, klaim ketepatan (*rightness*), klaim ini terjadi bila orang sepakat mengenai pelaksanaan norma-norma sosial. Ketiga, klaim autentisitas atau kejujuran (*sincerity*), klaim ini terjadi ketika orang sepakat tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang. Keempat, klaim komprehensibilitas, klaim ini tercapai bila orang mampu menjelaskan ketiga klaim sebelumnya dan mencapai suatu kesepakatan atasnya (Habermas, 2007).

Menurut Habermas seluruh komunikasi yang efektif dan berhasil harus mengikuti struktur klaim kebenaran, ketepatan, kejujuran dan komprehensibilitas (Habermas, 2007). Keempat klaim inilah yang akan menentukan validitas dari suatu komunikasi yang baik. Kemudian komunikasi tersebut akan menghasilkan sebuah konsensus atau kesepakatan yang rasional. Namun, keempat klaim ini harus dibangun dalam suatu komunikasi yang dilandasi oleh akal budi yang sehat dan semangat kebebasan sebagai pondasi yang kuat (Pandor, 2014). Ketika komunikasi itu dibangun dan dibentuk dengan akal budi yang sehat serta dalam semangat kebebasan, maka akan muncul objek yang disebut dengan kesepakatan atau konsensus yang rasional.

Setiap klaim tersebut harus selalu memerhatikan validitas universal dalam dua segi. *Pertama*, validitasnya tidak hanya untuk pembicara atau pendengar saja, atau hanya untuk satu konteks tertentu tetapi untuk kebaikan bersama. Sebab, validitas disini adalah validitas semua orang. *Kedua*, semua klaim tersebut adalah ciri formal komunikasi linguistik atau bahasa, terdapat di setiap laku penguji atau pembicara yang memahami setiap konteks diskusi (Habermas, 1998).

Suatu komunikasi yang baik dan benar akan melibatkan setiap orang yang ada di dalamnya dapat saling mengerti satu sama lain, sehingga terjadi suatu komunikasi intersubjektif. Pembicara harus memiliki maksud atau intensi serta niat yang jelas untuk mengomunikasikan sebuah proposisi yang benar (atau sebuah konten proposisional yang tentunya akan tetap eksis demi kebaikan bersama) sehingga pendengar dapat membagikan apa yang didupakannya. Ini berarti bahwa ada sesuatu yang dapat dibawa pulang untuk ditindaklanjuti setelah melakukan suatu komunikasi rasional dalam ruang publik. Pembicara juga harus menyatakan niatnya secara jujur sehingga pendengar dapat percaya dengan kata-katanya bukan hanya bualan belaka yang bersifat manipulatif demi kepentingan politiknya sendiri tetapi untuk kebaikan bersama. Akhirnya, tindakan komunikasi tidak dapat terganggu bila peserta mengandaikan bahwa validitas yang mereka klaim secara timbal balik dibenarkan semua orang yang memiliki tujuan yang sama demi kepentingan masyarakat (Howe, 2000).

Menurut Habermas tindakan komunikatif ini memiliki dua aspek, yakni aspek teleologis dan aspek komunikasinya sendiri (Rasuanto, 2005). *Pertama*, soal implementasi dari tindakan itu sendiri. *Kedua*, soal pencapaian kesepakatan atau konsensus yang mampu membawa kebaikan bersama. Artinya, ada dua situasi, yakni situasi tindakan dan situasi berujar atau berbicara. Situasi ini mengacu pada dunia kehidupan yang dihayati atau *Lebenswelt* (Rasuanto, 2005). Namun, pada saat yang sama, Habermas menunjukkan bahwa sebuah komunikasi akan berjalan dengan baik dan benar bila mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ketulusan, sehingga argumentasi dalam komunikasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat pun mampu memahami nilai dari sebuah komunikasi yang baik. Tindakan komunikatifnya tidak berdasarkan kekerasan, tetapi melakukan suatu argumentasi yang sesuai dengan fakta dan realitas yang apa adanya secara rasional.

Klaim-klaim yang digagas oleh Habermas ini pertama-tama dimaksudkan untuk mencapai suatu konsensus atau kesepakatan yang lebih rasional, sehingga semua orang dapat menerimanya. Konsensus ini dapat dinyatakan atau dianggap rasional, bila para peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim tersebut secara bebas dan tanpa paksaan, tetapi dalam suatu pertimbangan yang matang (Hardiman, 2009). Namun, komunikasi ini harus mengandung klaim yang secara bersamaan benar, tepat, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsensus tidak akan tercapai bila ada unsur paksaan di dalamnya, sebab hanya akan menimbulkan komunikasi sepihak.

Komunikasi yang rasional tentu berasal dari refleksi yang mendalam terkait dengan realitas manusia itu sendiri. Ruang publik bukan hanya sekedar untuk mengekspresikan pendapat atau ide-ide cemerlang tetapi untuk menjadi wadah bagi semua yang berkehendak baik. Realitas ini tidak bisa dipungkiri bahwa manusia perlu ruang diskusi yang tidak hanya milik elit politik atau mereka yang punya kuasa. Sebab ruang publik untuk kepentingan masyarakat seringkali hanya menjadi milik mereka yang punya jabatan dan yang merasa punya pengetahuan. Masyarakat kecil sering tidak dilibatkan maka tidak heran bila kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Orang menjadi lupa pada realitas masyarakat dan jatuh pada idealisme yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kita perlu membangun ruang publik yang terkontrol sehingga memunculkan ide-ide yang relevan sesuai kebutuhan, kepentingan dan kebaikan bersama.

b. Etika Komunikasi Netizen dan Media Sosial

Hari ini, perkembangan teknologi terus bergerak secara cepat. Segala sesuatu dimudahkan secara praktis termasuk untuk menjangkau ilmu pengetahuan. Orang tidak perlu lagi repot pergi ke perpustakaan membaca buku, pergi ke pasar untuk belanja dan sebagainya, asalkan terkoneksi dengan internet, orang dapat menjangkau segalanya dengan mudah. Perkembangan teknologi ini tentu tidak hanya melahirkan media baru tetapi juga komunikasi dan interaksi manusia yang baru (Prasetya et al., 2022) (Nurrachmi F & Puspita T, 2018).

Komunikasi dan interaksi yang baru ini dapat kita temukan di media sosial yang memaparkan banyak *platform* yang menarik. Mobilisasi dan orkestrasi yang terus mengalir sebagai wujud dari revolusi industri dari mesin dan segala benda, baik buatan alam maupun manusia, sama-sama terhubung dengan manusia dari segala belahan dunia (Kasali, 2019). Menurut Rhenald hal ini terjadi karena adanya koneksi melalui enam pilar teknologi, yakni *Internet of thing* (IoT), *Cloud Computing*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence*, *Super Apps*, dan *Broadband Infrastructure* (Kasali, 2019).

Setiap pilar teknologi yang memengaruhi koneksi manusia ini tentu memiliki unsurnya masing-masing. Contohnya, *super apps* (suatu aplikasi kelas gajah dengan pengunduh ratusan juta orang) dan media sosial yang ada dalam *device* merupakan *interface platform* yang digunakan hampir bahkan lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia secara aktif, yang kemudian dikirim berupa data ke *cloud* melalui *broadband infrastructure (network)* (Kasali, 2019). Sistem ini juga memberi pengaruh bagaimana kinerja dalam pengolahan data. Tanpa disadari, para pengguna media sosial masuk pada kondisi digital *panoptic-on*, suatu pengawasan yang secara detail untuk mendapatkan selengkap mungkin data perilaku penggunaan internet melalui *big data analysis* (Gunawibawa et al., 2021). Kemudian melalui data analitik ini, *big data* itu bisa memberikan detail-detail yang kemudian diolah oleh algoritma masing-masing *super apps* dan *platform* (Kasali, 2019) yang digunakan oleh jutaan orang di dunia ini. Pada saat yang sama, orang tidak menyadari data-datanya bisa diretas oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi pada satu sisi segalanya dimudahkan dalam proses pencarian ilmu pengetahuan. Manusia masuk pada mobilisasi yang deras dengan segala kejeniusannya. Namun, apakah netizen kita sungguh-sungguh paham mengenai prinsip-prinsip mobilisasi dan terpanggil menjadi *genuine participant* (partisipan dengan nilai-nilai yang positif), maupun yang menerima tugas khusus pesanan untuk mengganggu brand-brand kuat (Kasali, 2019).

Dari konsep diatas, dapat kita pahami bahwa setiap hari jutaan orang membuat dan membagikan konten digitalnya yang kemudian dapat dibaca, ditonton dan dikomentari oleh netizen. Komentar-komentar yang disajikan begitu variatif baik yang positif maupun negatif. Komentar-komentar tersebut tentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran, sebab tidak memiliki validasi yang jelas. Namun, akan dapat membahayakan bila terjadi suatu ujaran kebencian bahkan menimbulkan terjadinya *cyber bullying* terhadap individu maupun kelompok. Netizen dapat dengan bebas menghujat dan mendiskreditkan sesamanya. Hal ini tentu dapat memengaruhi psikis seseorang untuk berkembang (Nurrachmi F & Puspita T, 2018; Muawanah, 2021).

Media sosial menjadi ruang bebas untuk beropini dan berkomentar. Media sosial juga menjadi suatu fenomena yang tersebar luas sejak situs jejaring sosial yang populer dan signifikan secara cepat seperti *facebook* (2004) dan *twitter* (2006) yang diluncurkan untuk kepentingan politik (Salikov, 2018). Hal ini tentu membawa efek, yakni cara komunikasi manusia menjadi berubah dari dunia nyata ke dunia maya. Bahkan pemerintah pun sering kali tidak mampu membatasi dan membendung ekspresi di ruang kebebasan atau ruang digital tersebut (Mustofa, 2019). Kebebasan berkomunikasi ini rupanya memunculkan sikap sarkasme yang memicu kerusakan komunikasi dan relasi manusia. Sarkasme adalah suatu ungkapan yang mengandung

kata-kata yang menyakitkan. Gaya bahasa yang digunakan pada umumnya dapat menyakitkan hati pendengar, pembaca dan pengunduh konten di media sosial, artinya tuturan sarkasme ini berkonotasi kurang sopan dan bersifat negatif (Siska Lutfiyani, Burhan Eko Purwanto, 2021; Elen Inderasari, Ferdian Achسانی, 2019).

Berikut beberapa foto untuk merepresentasikan cara komunikasi netizen Indonesia:



Gambar 1. Akun twitter Ade Armando

Gambar 2. Akun twitter Jokowi ketika mengunjungi IKN

Gambar di atas menunjukkan bahwa netizen Indonesia merasa bebas untuk berkomentar apa pun. Kolom komentar yang disediakan oleh platform-platform media sosial tersebut menjadi ruang publik untuk menuangkan gagasan-gagasan secara bebas baik secara positif maupun negatif apalagi bila berlawanan pendapat akan semakin memicu ruang tersebut menjadi ruang yang *chaos*. Fenomena sarkasme ini menjadi sulit untuk dihindari dan dibendung. Media sosial menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran, pandangan, pendapat atas suatu permasalahan yang menjadi kepentingan bersama (*public concern*) (Asri, 2021). Namun, pada satu sisi, kita perlu mencernanya secara kritis apakah ruang kebebasan ini menjadi ruang atau arena yang kredibilitas atau hanya untuk pemenuhan ereksi pribadi.

Komentar yang diberikan kepada pengguna media sosial lainnya juga terungkap sebagai sebuah ekspresi diri. Ekspresi yang terkadang berlebihan bahkan hanya berfokus pada persoalan sepele atau hal yang tidak terlalu penting, ekspresi yang hanya berfokus pada faktor-faktor kebencian yang tidak beralasan, ekspresi yang berfokus pada hal-hal negatif dan tidak membangun diri sendiri dan orang lain (Gamayanto et al., 2017). Ekspresi diri ini tentunya akan memengaruhi sikap orang berkomunikasi dan sikap menahan diri. Orang tidak lagi mau belajar literasi dengan baik. Ungkapan-ungkapan yang digunakan pun bersifat kasar dan lebih cenderung pada pelampiasan atau ekspresi rasa ketidaksukaan atau bahkan iri hati (Harmaningsih et al., 2021).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Joviano Siahaan, Wella, Ririn I. Desanti yang berjudul "Apakah Youtuber Indonesia Kena *Bully* Netizen?" (Siahaan et al., 2020), mereka menemukan bahwa jumlah analisa sentimen terhadap beberapa *public figure* sangat besar. Sentimen ini juga terjadi pada pejabat pemerintah termasuk presiden. Ruang media sosial tidak lagi menjadi ruang informasi yang positif tetapi menjadi ruang publik anarkis bahkan orang sering kali melupakan esensi rasionalitasnya. Padahal media sosial dapat menjadi ranah demokrasi yang mengawasi banyak bidang. Demokrasi yang membantu orang berpikir rasional melalui data-data positif yang dipasang di berbagai platform media digital. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan wajah demokrasi ini dipengaruhi oleh internet yang rupanya juga berimbas terhadap industri media (Haezer, 2018).

Kolom komentar menjadi ruang kebebasan untuk berekspresi apalagi bila berlawanan pendapat atau sesuatu yang bersifat kontradiktif dengan keinginan. Fenomena sarkasme ini menjadi sulit untuk dihindari dan dibendung. Padahal media sosial hendaknya menjadi forum masyarakat yang mengantar orang pada cara pandang yang baru dalam melihat realitas. Realitas di mana dunia mengalami suatu disrupsi karena adanya transisi komunikasi manusia dari verbal ke digital. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji kembali dan mencernanya secara kritis apakah ruang kebebasan ini menjadi arena yang kredibilitas atau hanya untuk pemenuhan ereksi pribadi?

Media sosial seolah-olah menjadi ruang demokrasi yang menentukan segalanya. Kemudian secara perlahan dan bertahap menjadi salah satu *platform* komunikatif utama dan bebas untuk politik dan individu aktivisme dalam arti demokrasi deliberatif dan partisipatif (Salikov, 2018). Netizen pun terpengaruh dan menuturkan berbagai opini sebagai bagian dari demokrasi sosial. Padahal masyarakat yang komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik yang mengucil atau melakukan pengujaran kebencian atau berita bohong (*hoax*) melainkan lewat argumentasi yang rasional yang membawa orang pada kebaikan bersama (Hardiman, 2009).

Media sosial memang memberi ruang kepada siapa pun termasuk kepentingan politik, kehadirannya memberi jalan baru bagi demokrasi (Haezer, 2018). Tetapi ruang ini tidak memiliki validitas yang kuat untuk sebuah konsensus atau kesepakatan yang rasional. Netizen memang diberi ruang kebebasan tetapi tidak memiliki kredibilitas yang mumpuni. Keberadaan *wall* atau dinding sebagai tempat pengguna menyampaikan ide dan gagasan, tidak bisa dianggap sebagai upaya untuk menciptakan atau terlibat dalam debat kritis sebagaimana terjadi dalam ruang publik pada umumnya (Haezer, 2018).

Situasi ini tentu akan menjadi ricuh ketika orang tidak lagi mampu mengontrol diri atau memfilter informasi di media sosial. Pengetahuan dan teknologi yang kita terima dalam bentuk media sosial menjadi *chaos* dan merusak relasi manusia. Kemudahan informasi yang diberikan oleh teknologi menjadikan orang jatuh pada cara hidup yang mendangkal tanpa makna. Orang menjadi enggan untuk berefleksi dan mencari nilai hidup yang lebih mendalam. Akibatnya, orang mudah cemas dan jatuh pada narsisme sebagai ungkapan dari eksistensinya sebagai anak zaman.

c. Media Sosial sebagai Ruang Publik Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem atau hidup yang melibatkan semua orang dalam membangun suatu bangsa dan negara, di dalamnya orang bersama-sama menyelesaikan atau memecahkan persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh suatu negara, dan bukan didikte oleh diktator (Bertens, 2001). Seperti yang sudah kita ketahui bahwa konsep demokrasi selalu menjunjung nilai partisipatif. Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam membangun negaranya. Tetapi konsep demokrasi ini sering kali dikotori oleh beberapa oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Misalkan *money game* atau permainan uang dalam politik. Hal ini tentu mendiskreditkan politik itu sendiri sehingga tidak mengherankan bila banyak orang meragukan kemungkinan pemilu yang sungguh-sungguh demokrasi (Bertens, 2001). Lalu bagaimana dengan *platform* media sosial? Apakah memungkinkan sebagai suatu ruang demokrasi yang sehat?

Pertanyaan ini tentu menuntut suatu kesadaran kritis untuk melihat fakta atau realitas penggunaan media sosial hari ini. Sebab seperti penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat kita masih menikmati media sosial sebagai bentuk aktualisasi diri. Media sosial menjadi ruang publik digital yang dapat disentuh oleh banyak orang. Ada suatu identitas baru yakni identitas digital yang menunjukkan siapa manusia dewasa ini (Prasetyo, 2022). Namun pada saat yang sama, Habermas melihat ruang publik digital ini telah dikomersialisasikan demi kepentingan pemilik modal atau pemasang iklan (Haezer, 2018). Di dalamnya ada orang yang mengambil kesempatan untuk kepentingan-kepentingan politik.

Melihat realitas perkembangan dunia dan segala persoalannya ini, kita perlu menata kesadaran demokrasi ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dewasa ini terdapat kesadaran umum atau kesepakatan luas di antara para peserta diskursus yang melintas perbagai aliran dan gaya pemikiran politik, bahwa *pertama*, sistem politik kita sekarang masih memiliki defisit dalam kadar kedemokrasiannya, dan *kedua*, bahwa sekarang sudah waktunya kadar demokrasi sistem politik kita ditingkatkan (Magnis-Suseno, 1997). Pemerintah tidak bisa tinggal diam dalam suatu realitas yang hanya mementingkan dirinya atau kelompoknya. Oleh karena itu, sistem demokrasi politik kita perlu

dilihat kembali secara menyeluruh agar masyarakat umum pun terlibat dan punya nilai partisipatif dalam cara baru yang komprehensif.

Partisipasi demokrasi ini bukan hanya untuk memenuhi hukum atau sistem pemerintahan tetapi untuk membangun kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial yang rasional. Artinya setiap warga negara berhak mengambil posisi partisipatif mengembangkan negaranya tanpa ada yang didiskreditkan atau dikucilkan. Bangsa Indonesia tidak bisa mengambil jalan lain. Dia harus berada pada sistem demokrasi yang menuntunnya pada cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka, kita perlu formatio atau pendidikan demokrasi yang masif untuk mengerti suatu bangsa yang bermartabat. Karena melalui pendidikan demokratis ini, kita semua diharapkan mampu masuk pada sistem yang jelas. Sistem yang menuntun kita pada nilai-nilai pertumbuhan dan mampu berpikir secara menyeluruh terkait dengan realitas bangsa kita.

Realitas ini juga termasuk bagaimana masyarakat kita menanggapi perkembangan teknologi sebagai media demokrasi. Kehadiran *wall* yang ditampilkan di dalam media sosial sebagai ajang adu komentar bukanlah upaya untuk menciptakan debat kritis dan rasional (Haezer, 2018). Namun lebih pada komunikasi sehari-hari manusia yang bersifat naif dalam bentuk virtual. Di sisi lain, *wall* ini dapat menampilkan banyak informasi yang menciptakan suatu kesadaran bersama. Kesadaran bersama ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan publik (Asri, 2021).

Kehadiran media sosial yang memberi ruang informasi tentu menjadi ranah perdebatan yang pada masanya masuk pada industrialisasi wacana tentang media publik atau jurnalisme publik (Supriadi, 2017). Hal ini kemudian dikritisi oleh Habermas terkait dengan perindustrian yang mengkomoditi informasi demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Media sosial menjadi dua mata pisau yang dapat membunuh kesadaran manusia karena disuguhi berbagai informasi dan sekaligus memanjakan pikiran untuk menikmati konten-konten yang terus *update*.

Terkait dengan kehadiran media sosial yang menjadi ranah ruang publik demokrasi. Subjek atau pengguna media sosial perlu dan harus memiliki kontrol sosial yang intensitasnya sama tanpa mendiskreditkan yang lain (Pembayun, 2017). Nilai demokrasi dalam ruang publik media sosial pun tidak dipinggirkan. Kebebasan dalam bermedia sosial tetap pada porsinya. Masyarakat tetap memiliki kebebasannya sebagai bentuk partisipasi politik. Hal inilah yang diinginkan oleh Habermas dalam mencapai ruang publik yang sehat. Semua kalangan terutama masyarakat bawah mampu masuk pada nilai konsensus yang rasional (Pembayun, 2017). Tentu dengan suatu komunikasi yang sepadan dengan aparat pemerintahan yang dijembatani oleh media teknologi.

Media komunikasi memang memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk berpendapat dan beraspirasi. Dalam Undang-Undang pasal 28E ayat 3 menetapkan tentang kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri. Setiap orang berhak menyampaikan opininya, berkumpul dan bermufakat bersama demi kebaikan bersama atau *bonum communa*. Melalui opini personal yang disampaikan kepada publik melalui media sosial menjadi pertimbangan bersama dalam kebijakan umum. Artinya ada nilai partisipatif dari rakyat untuk kebaikan bersama. Konsep inilah yang menurut Habermas sebagai ruang publik yang mampu menjembatani nilai-nilai demokrasi yang diharapkan oleh semua orang demi kepentingan bangsa. Masyarakat tidak hanyut dengan sikap konsumerisme yang sifatnya menerima saja tetapi tidak sadar realitas baru. Oleh karena itu perlu suatu kesadaran kritis yang membuat mereka bebas dan bertanggung jawab dengan hidupnya dan sesama.

4. Simpulan dan Saran

Kehadiran media sosial membuat orang terbuka dan melek terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Namun, kehadirannya ini perlu diantisipasi dengan tindakan yang rasional tanpa mengurangi nilai-nilai kehebatannya. Media sosial memang memberi ruang kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat apa pun sebagai bentuk ekspresi dirinya. Meskipun ekspresi diri ini terungkap dalam bentuk sarkasme yang menyebabkan keruntuhan ruang publik rasional. Ruang publik yang dimunculkan oleh Habermas sebenarnya bertujuan untuk mawadahi komunikasi intersubjektif yang rasional. Ruang publik ini menjadi ruang komunikasi dan deliberasi yang bebas, setara, yang saling menghargai hak masing-masing dan mendorong terbentuknya solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Tetapi di sisi lain, Habermas mau menjelaskan bahwa ruang publik tidak hanya mengacu pada "fungsi" atau "isi" dari komunikasi sehari-hari tetapi merujuk pada ruang sosial yang dihasilkan dalam tindakan komunikatif. Maka, tindakan komunikatif yang disampaikan dalam kolom komentar di media sosial hendaknya

dilandaskan pada kesadaran penuh yang rasional dan komprehensif, sehingga tidak mengacaukan satu dengan yang lain.

5. Daftar Pustaka

- Asri, R. (2021). *Ekspresi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Telaah Kritis Ruang Publik Habermas di Era Post Truth*. January, 35.
- Bertens, K. (2001). *Perspektif Etika*. Kanisius.
- Bo'do, S., Siahaan, H., & Ida, R. (2019). Social Media, Public Space, and Movement Discussion of Urban Farming in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(3), 250–261. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.414>.
- Center, I. N. (2021). *Studi Terbaru dari Microsoft Menunjukkan Peningkatan Digital Civility (Keadaban Digital) di Seluruh Kawasan Asia-Pacific Selama Masa Pandemi*. Indonesia News Center. <https://news.microsoft.com/id-id/2021/02/11/studi-terbaru-dari-microsoft-menunjukkan-peningkatan-digital-civility-keadaban-digital-di-seluruh-kawasan-asia-pacific-selama-masa-pandemi/>.
- Elen Inderasari, Ferdian Achسانی, B. L. (2019). Bahasa Sarkasme Netizen Dalam Komentar Akun Instagram “Lamber Turah.” *Sematik*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.22460/semantik.vXiX.XXX>.
- Fauziah, N. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Netizen Paling Tidak Sopan Pada Media Online CNN Indonesia dan Kompas.com*.
- Gamayanto, I., Nilawati, F. E., & Suharnawi. (2017). Pengembangan dan Implementasi dari Wise Netizen (E-Comment) di Indonesia. *Techno.Com*, 16(1), 80–95. <https://doi.org/10.33633/tc.v16i1.1323>.
- Gunawibawa, E. Y., Oktiani, H., & Frasetya, V. (2021). Pengetahuan Literasi Digital Terhadap Digital Surveillance Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Pada Era Internet of Things. *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)*, 3(1), 71–80. <https://doi.org/10.37715/leecom.v3i1.1892>.
- Habermas, J. (1998). *Postmetaphysical Thingking: Philosophical Essays*. Blackwell Publisher Ltd.
- Habermas, J. (2007). *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (I. R. Muzir (ed.)). Kreasi Wacana.
- Haezer, E. (2018). Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik dalam Perspektif Habermas. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 4(2), 181–196.
- Hardiman, F. B. (2009a). *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2009b). *Menuju Masyarakat Lomunikatif* (5th ed.). Kanisius.
- Harmaningsih, D., Yunarti, S., & Wijayanti. (2021). Anonimitas Netizen di Media Sosial. *KRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 76–85.
- Howe, L. A. (2000). *On Habermas*. Wadsworth Philosophers Series.
- Kasali, R. (2019). *MO Sebuah Dunia Baru Yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham* (1st ed.). MIZAN.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Menoh, G. A. B. (2015). *Agama dalam Ruang Publik Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Muawanah, L. (2021). Etika Komunikasi Netizen di Instagram dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ath-Thariq*, 05(02), 129–148. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/ath_thariq
- Mustofa, S. (2019). *Berebut Wacana : Hilangnya Etika Komunikasi di Ruang Publik Dunia Maya*. 15(01), 58–74. <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1139>

- Nuraeni, I., Harisanti, N. L. R., & Maksum, H. (2022). Tuturan Kebencian dalam Komentar Warganet. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(3), 189–197.
- Nurrachmi F, S., & Puspita T, R. (2018). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen dalam Menerima Berita dan Informasi pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1-9s.
- Pandor, P. (2014). *Seni Merawat Jiwa Tinjauan Filosofis* (Y. Leseq (ed.); 1st ed.). OBOR.
- Pembayun, J. G. (2017). Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 1(1), 1–14.
- Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A. (2022). Pola Perilaku Bermedia Sosial Netizen Indonesia Menyikapi Pemberitaan Viral di Media Sosial. *Journal of Digital Communication and Design*, 1(1), 1–12.
- Prasetyo, A. A. (2022). Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jürgen Habermas dan Ruang Publik Digital. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 213–218.
- Purwaningsih, D. A., & Sabardila, A. (2020). Respons Netizen terhadap Caption Publik Figur di Instagram. *Lingua Franca*, 4(2), 213–225.
- Rasuanto, B. (2005). *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Regilme, S. S. F. (2018). Habermasian Thinking on Civil Society and the Public Sphere in the Age of Globalization. *Perspectives on Political Science*, 47(4), 271–277. <https://doi.org/10.1080/10457097.2016.1175805>.
- Riyanto, F. X. E. A. (2018). *Relasionalitas Filsafat fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen* (Widiantoro (ed.); 1st ed.). Kanisius.
- Salikov, A. (2018). Hannah Arendt, Jürgen Habermas, and Rethinking the Public Sphere in the Age of Social Media. *Russian Sociological Review*, 17(4), 88–102. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-4-88-102>
- Sherly Christina. (2019). Sarcasm in Sentiment Analysis of Indonesian Text: A Literature Review. *Jurnal Teknologi Informasi Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 13(2), 54–59. <https://doi.org/10.47111/jti.v13i2.255>.
- Siahaan, J., Wella, W., & Desanti, R. I. (2020). Apakah Youtuber Indonesia Kena Bully Netizen? *Ultima InfoSys: Jurnal Ilmu Sistem Informasi*, 11(2), 130–134. <https://doi.org/10.31937/si.v11i2.1764>.
- Siska Lutfiyani, Burhan Eko Purwanto, S. A. (2021). Sarkasme Pada Media Sosial Twitter dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Tabasa: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*, 1(2).
- Sucitarni, N. N. A., & Sumartini, N. L. U. (2018). Verbal Bullying dalam Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 6(2), 152–171.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>.